BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan

PT. Dirgantara Indonesia (DI) (nama bahasa Inggris: *Indonesian Aerospace Inc.*) adalah industri pesawat terbang yang pertama dan satu-satunya di Indonesia dan di wilayah Asia Tenggara. Perusahaan ini dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. DI didirikan pada 26 April 1976 dengan nama PT. Industri Pesawat Terbang Nurtanio dan BJ Habibie sebagai Presiden Direktur. Industri Pesawat Terbang Nurtanio kemudian berganti nama menjadi Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) pada 11 Oktober 1985. Seteleah direstrukturisasi, IPTN kemudian berubah nama menjadi Dirgantara Indonesia pada 24 Agustus 2000.

PT Dirgantara Indonesia tidak hanya memproduksi berbagai pesawat tetapi juga helikopter, senjata, menyediakan pelatihan dan jasa pemeliharaan (*maintenance service*) untuk mesin-mesin pesawat. Dirgantara Indonesia juga menjadi sub-kontraktor untuk industri-industri pesawat terbang besar di dunia seperti Boeing, General Dynamic, Fokker dan lain sebagainya. Dirgantara Indonesia pernah mempunyai karyawan sampai 16 ribu orang. Karena krisis ekonomi banyak karyawan yang dikeluarkan dan karyawannya kemudian menjadi berjumlah sekitar 4000 orang.

Pada awal hingga pertengahan tahun 2000-an Dirgantara Indonesia mulai menunjukkan kebangkitannya kembali, banyak pesanan dari luar negeri seperti

Thailand, Malaysia, Brunei, Korea, Filipina dan lain-lain. Meskipun begitu, karena dinilai tidak mampu membayar utang berupa kompensasi dan manfaat pensiun dan jaminan hari tua kepada mantan karyawannya, DI dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 4 September 2007. Namun pada tanggal 24 Oktober 2007 keputusan pailit tersebut dibatalkan.

4.1.1.1 Sejarah Singkat PT Dirgantara Indonesia Bandung (Persero)

PT Dirgantara Indonesia dahulu PT IPTN dan sebelumnya PT Nurtanio, berasal dari pengambilan fasilitas LIPNUR (Lembaga industry Penerbangan Nurtanio)-TNI AU. Dengan berdasar kepada Peraturan Pemerintah No. 12, tanggal 15 April 1976, dipersiapkan pendirian industri pesawat terbang dengan menghimpun *asset*, fasilitas dan potensi Negara, yaitu *asset* pertamina, divisi *Advance Technology* dan Teknologi Penerbangan (ATTP) yang semula disediakan untuk pembangunan industri pesawat terbang dengan *asset* LIPNUR sebagai modal dasar pendirian industri pesawat terbang Indonesia. Dengan modal ini diharapkan tumbuh sebuah industri pesawat terbang yang mampu menjawab tantangan jaman. Berdasarkan Akte Notaris No. 15, tanggal 28 April 1976 didirikanlah PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio. Setelah dilakukan pembenahan dan pembangunan fisik yang diperlukan, tertanggal 28 April 1976 PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio (PT Nurtanio) diresmikan. Lalu pada tanggal 17 April 1986, berubah nama menjadi PT Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN), dan pergantian nama yang terakhir diresmikan pada tanggal 24 Agustus 2000, menjadi PT Dirgantara Indonesia (PT DI).

PT Dirgantara Indonesia memiliki *core competence* dalam bidang : *aircraft design, development and manufacturing of civilan and military regional commuter aircraft* sejak tahun 1976 telah dapat mengembangkan produk bukan hanya pesawat terbang tetapi termasuk : *Telecommunication, Automotive, maritime, Information Technology, Oil $ Gas, Control & Automation, Military, Simulation Technology, Indusrial Turbine, and Engineering Sevices.*

Melalui program restrukturisasi yang puncaknya terjadi pada tahun 2004, maka PT Dirgantara Indonesia sekarang didukung oleh sekitar 3.720 personil, yang sebelumnya berjumlah 9.703 personil dengan 18 Satuan Usaha. Saat ini disederhanakan menjadi 5 Satuan Usaha saja, yaitu :

a. *Aircraft Design* & *Manufacturing* (*Airplane* & *Helicopter*)
b. *Aerostructure* (*Parts* & *Components*, *Sub-Assemblies*, *Assemblies*, *Tools* & *Equipment*)
c. *Aircraft Services* (*Maintenance*, *Overhaul*, *Repair* & *Alteration*)
d. *Engineering Services* (*Simulation Technology*, *Electronic Visualization System*)
e. *Defence* (*Launchers, SUT Torpedo, Rockets*)

4.1.1.2 Visi dan Misi Perusahaan

Visi dari PT Dirgantara Indonesia adalah menjadi perusahaan kelas dunia dalam industri dirgantara yang berbasis pada penguasaan tekonologi tinggi dan mampu bersaing dalam pasar global dengan mengandalkan keunggukan biaya.

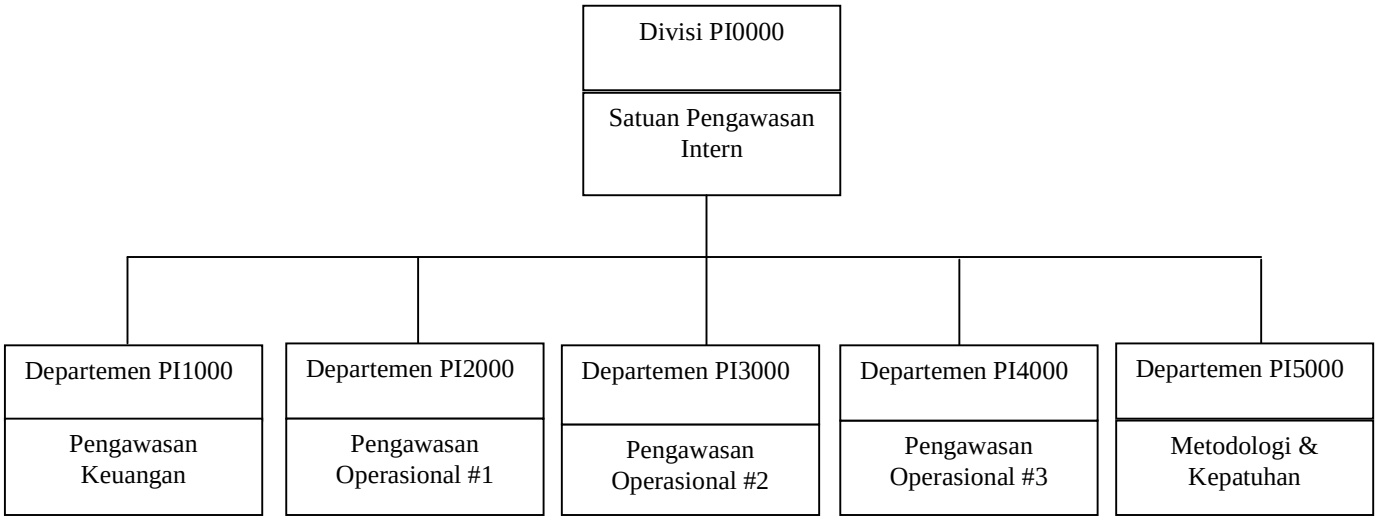
Adapun misi yang dijadikan pedoman PT Dirgantara Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Menjalankan usaha dengan selalu berorientasi pada aspek bisnis dan komersil dan dapat menghasilkan produk dan jasa yang memiliki keunggulan biaya.
2. Sebagai pusat keunggulan di bidang industri dirgantara Indonesia terutama dalam rekayasa, rancang bangun, manufaktur, produksi dan pemeliharaan untuk kepentingan komersial dan militer dan juga untuk aplikasi di luar industri dirgantara.
3. Menjadikan perusahaan sebagai pemain kelas dunia di industri global yang mampu bersaing dan melakukan aliansi strategis dengan industri dirgantara kelas dunia lainnya.

4.1.2 Struktur Organisasi Tingkat Departemen Satuan Pengawasan Internal dan Komite Audit di PT Dirgantara Indonesia (Persero) Bandung

Setiap perusahaan pada dasarnya menginginkan agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, diperlukan struktur organisasi yang jelas agar setiap karyawan yang menjadi anggota organisasi tersebut ,mengerti akan tanggung jawab dan wewenang masing-masing. Struktur organisasi yang dimiliki oleh PT Dirgantara Indonesia (Persero) Bandung memiliki wewenang dan tanggung jawab tersendiri dalam meraih pangsa pasar dalam wilayah yang menjadi kekuasaannya, disamping itu juga memiliki wewenang untuk melakukan dan menciptakan produk-produk yang dihasilkan.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Dirgantara Indonesia (Persero) Bandung Nomor : SKEP/070/031.01/PTD/KA0000/01/2008, tentang penetapan struktur organisasi tingkat departemen di lingkungan Satuan Pengawasan Intern, maka struktur organisasi departemen internal audit di PT Dirgantara Indonesia terdiri atas :



GAMBAR 4.1

Struktur Organisasi Departemen SPI dan Komite Audit

4.1.3 Uraian Tugas Komite Audit di PT Dirgantara Indonesia Bandung (Persero)

Fungsi Satuan Pengawasan Intern (SPI) sebagai pengelola aktivitas pemeriksaan perusahaan diuraikan menjadi 6 (enam) aktivitas sebagai berikut :

1. Merencanakan Program SPI.

   Mengelolala kegiatan penyusunan perencanaan program SPI baik jangka panjang maupun jangka pendek yang meliputi kegiatan pemeriksaan dan non-pemeriksaan. Penyusunan rencana pemeriksaan didasarkan penilaian risiko yang dilakukan paling sedikit setahun sekali. Sebagai bahan masukkan penyusunan diambil dari Laporan Internal dan Eksternal, data *monitoring* dan permintaanaudit dari manajemen. Penyusunan rencana non-pemeriksaan meliputi aktivitas pemberian jasa konsultasi, penilaian dan pengembangan aktivitas audit, *training*, *partnership* dan lain-lain.

2. Melaksanakan Program Audit

   Mengelola kegiatan pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan melalui 3 (tiga) tahap, yaitu:

   a. Tahap persiapan pemeriksaan dengan tujuan mengumpulkan informasi umum dan bukti pemeriksaan sebagai dasar pembuatan program pemeriksaan pendahuluan seperti dasar hokum, sejarah usaha, organisasi, daftar aktiva, prosedur kegiatan dan tinjauan fisik.
   b. Tahap pemeriksaan pendahuluan dengan tujuan memperoleh identifikasi mengenai aspek pengendaluian manajemen yang lemah sebagai dasar penyusunan program pemeriksaan lanjutan.
   c. Tahap pemeriksaan lanjutan merupakan pemriksaan secara rinci yang merupakan kelanjutan dari pemeriksaan pendahuluan.

3. Melaporkan Hasil Audit

   Mengelola kegiatan penyusunan hingga pendistribusian laporan yang diantaranya, meliputi :

   a. Konfimrasi temuan pemeriksaan dengan pihak *auditee* yang menghasilkan daftar temuan rinci.
   b. Penyusunan draft Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
   c. Penyusunan akhir atas draft LHP pimpinan tertinggi *auditee*.
   d. Pembuatan LHP dan menyampaikannyakepada direktur utama dan pihak yang terkait lainnya.

2. Memonitor dan memeriksa tindak lanjut temuan/rekomendasi mengelola kegiatan pelaksanaan pemeriksaan tindak lanjut, yaitu :

   a. Membuat daftar *monitoring* yang dihasilkan dari aktivitas auditee.
   b. Memeriksa tindak lanjut atas temuan/rekomendasi yang telah disampaikan oleh LHP.
   c. Merekomendasikan temuan *monitoring* sebagai fungsi *Daily Operatian Control*.

3. Mengevaluasi Kinerja Auditor

   Mengelola kegiatan pelaksanaan, memonitor dan menilai efektivitas program jaminan dan peningkatan kualitas audit yang meliputi tahapan:

   a. Mengumpulkan dan menganalisa LHP dan bukti pemeriksaan.
   b. Membuat kuesioner yang akan diisi oleh manjemen/*auditee*.
   c. Menganalisa isi kuesioner.

d. Membuat penilaian kinerja auditor.

6. Mengembangkan Metode Audit

   Mengelola kegiatan pelaksanaan pengembangan pemeriksaan yaitu sebagai berikut :

   a. Mengumpulkan dokumen audit dan hasil observasi kegiatan pemeriksaan baik berupa hasil evaluasi kinerja auditor maupun riwayat atau permasalahan yang dihadapi pemeriksa.
   b. Membuat konsep/model pemriksaan sehingga melahirkan berbagai alternatif konsep/model dengan menggunakan teori/teknik audit modern.
   c. Pengujian konsep/model pemeriksaan bersam-sama dengan pemeriksa.
   d. Membuat kebijakan audit seperti : kebijakan pemriksaan, strategi pemriksaan, prosedur pemeriksaan, teknik dan metode pemeriksaan.

4.1.4 Kegiatan Perusahaan

Kegiatan usaha di PT Dirgantara Indonesia Bandung (Persero) dilaksanakan berdasarkan RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan) yang meliputi bidang produksi, pemasaran, penelitian dan pembangunan yang merupakan kegiatan pokok industri pesawat terbang yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Dalam bidang produksi dibagi atas program pesawat dan sistem senjata, program komponen dan program jasa. Dimana program pembuatan pesawat diadakan pada SU *Aircraft*, program pembuatan senjata pada SU *Defence*,

pembuatan komponen (*parts, tools and jigs*) ditangani oleh SU *Aerostructure*, serta program *service* ditangani oleh ACS (SU *Aircraft Services*).

2. Dalam bidang pemasaran, usaha yang dilakukan untuk pemasaran dalam negeri diarahkan pada peningkatan penjualn pada instansi pemerintah maupun perusahaan penerbangan sedangkan untuk pemasaran luar negeri dilakukan tahap pendekatan penjualan dan realisasi penjualan produk CN-235 dan NBELL-412 sebagai sub kontraktor dari industri *aircraft* di luar negeri (*Boeing General Dynamics*, British *Aerospace*) dan untuk pesawat N-250 baru diadakan tahap promosi pendekatan penjualan.
3. Dalam bidang penelitian dan pengembangan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti melakukan pengmbangan program N-250 (*Turbo Prop*) dan N-2130 (*Turbo Jet*) sedangkan untuk pengembangan program produk yang sudah ada melalui CN-235 MPA/ versi militer (angkut barang, *paratroop*, ambulan udara), pengembangan material komposit untuk pesawat CN-412, tes kualifikasi sistem senjata pada pesawat NBELL-412, pengembangan roket dan torpedo. Kegiatan-kegiatan tersebut pada dasarnya adalah melanjutkan dan mengembangkan program-program baru disamping kegiatan-kegiatan lainnya sebagai penunjang usaha yang bersifat administratif dan pengembangan dalam manajemen. Usaha-usaha yang telah dilakukan oleh PT. Dirgantara Indonesia untuk meningkatkan penjualan baik di dalam negeri maupun di luar negeri adalah dengan meningkatkan pangsa pasar tertentu

untuk pesawat N-250, CN-235, NBELL-412 dan NAS-332 serta program jasa ACS (SU *Aircraft Services*) dan (*Universal Maintenance Center*).

4.1.5 Karakteristik Responden

Data responden yang berhasil dikumpulkan oleh penulis dari penelitian ini adalah sebanyak 30 orang. Sesuai dengan ukuran sampel telah ditentukan di Bab III. Data mengenai karakteristik responden adalah sebagai berikut :

a. Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase %
Pria	18	60
Wanita	12	40
Jumlah	30	100

(Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2010)

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui profil Karyawan PT Dirgantara Indonesia berdasarkan jenis kelamin. Data yang diperoleh melalui kuesioner yang diisi oleh responden menunjukkan bahwa responden yang berjenis kelamin pria berjumlah 18 orang atau sebesar 60% dan responden yang berjenis kelamin wanita berjumlah 12 orang atau sebesar 40%, jadi responden paling banyak berdasarkan jenis kelamin adalah pria. Jumlah responden lebih banyak pria karena untuk menjalankan pengawasan dan duduk dalam pengawasan diharapkan adalah pria

karena pria dianggap mampu menjalankan fungsi pengawasan dengan lebih baik dibandingkan pengawasan yang dijalankan oleh wanita.

b. Profil Responden Berdasarkan Usia

Profil responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel 4.2 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2
Profil Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah Responden	Persentase %
21-30 Tahun	6	20
31-40 Tahun	9	30
41-55 Tahun	15	50
Jumlah	30	100

(Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2010)

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui profil Karyawan PT Dirgantara Indonesia berdasarkan usia. Data yang diperoleh melalui kuesioner yang diisi oleh responden menunjukkan bahwa responden yang berusia 21-30 tahun berjumlah 6 orang atau sebesar 20%, responden yang berusia 31-40 tahun berjumlah 9 orang atau sebesar 30% dan responden yang berusia 41-55 tahun berjumlah 15 orang atau sebesar 50%. Jadi responden paling banyak berdasarkan usia adalah responden yang berusia 41-55 tahun berjumlah 15 orang. Hal ini dikarenakan oleh pada tingkat usia 41-51 adalah merupakan masa yang matang dan produktif untuk bergabung dan menjalankan sebuah perusahaan. PT. Dirgantara Indonesia (Persero) juga mengharapkan perusahaannya dapat berjalan dengan baik sesuai tujuan utamanya.

c. Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Profil responden berdasarkan pendidikan terakhir dapat dilihat pada tabel 4.3 seperti sebagai berikut :

Tabel 4.3
Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Usia	Jumlah Responden	Persentase %
S2	4	13,33
S1	12	40
Diploma	8	26,67
SMA	6	20
Jumlah	30	100

(Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2010)

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui profil Karyawan PT Dirgantara Indonesia berdasarkan pendidikan terakhir. Data yang diperoleh melalui kuesioner yang diisi oleh responden menunjukkan bahwa responden yang berpendidikan S2 berjumlah 4 orang atau sebesar 13,33%, responden yang berpendidikan S1 berjumlah 12 orang atau sebesar 40%, responden yang berpendidikan Diploma berjumlah 8 orang atau sebesar 26,67% dan responden yang berpendidikan SMA berjumlah 6 orang atau sebesar 20%. Jadi responden paling banyak berdasarkan pendidikan terakhir adalah S1. Responden dengan tingkat pendidikan S I adalah yang paling banyak, hal ini dikarenakan karena kebanyakan karyawan menuntut tingkat pendidikan yang tinggi. Hal inilah yang menyebabkan responden dengan tingkat pendidikan SI lebih banyak bila dibandingkan dengan responden dengan tingkat pendidikan yang lain.

d. Profil Responden Berdasarkan Lamanya Bekerja

Profil responden berdasarkan lamanya bekerja dapat dilihat pada table 4.4 seperti sebagai berikut :

Tabel 4.4
Profil Responden Berdasarkan Lamanya Bekerja

Lamanya Bekerja	Jumlah Responden	Persentase %
1-5 Tahun	2	6,66
6-10 Tahun	6	20
11-15 Tahun	7	23,33
16-20 Tahun	6	20
>20 Tahun	9	30
Jumlah	30	100

(Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2010)

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui profil Karyawan PT Dirgantara Indonesia berdasarkan lamanya bekerja. Data yang diperoleh melalui kuesioner yang diisi oleh responden menunjukkan bahwa responden berdasarkan lamanya bekerja berkisar antara 1-5 tahun berjumlah 2 orang atau 6,66%, responden berdasarkan lamanya bekerja berkisar antara 6-10 tahun berjumlah 6 orang atau 20%, responden berdasarkan lamanya bekerja berkisar antara 11-15 tahun berjumlah 7 orang atau 23,33%, responden berdasarkan lamanya bekerja berkisar antara 16-20 tahun berjumlah 6 orang atau 20%, dan responden berdasarkan lamanya bekerja lebih dari 20 tahun berjumlah 9 orang atau 30%. Jadi responden paling banyak berdasarkan lamanya bekerja adalah lebih dari 20 tahun dikarenakan untuk menjalankan pengawasan diperlukan pengalaman bekerja yang cukup untuk melakukan fungsi pengawasan.

4.2 Hasil Pembahasan

4.2.1 Analisis Peran Komite Audit Pada PT Dirgantara Indonesia (Persero)

Pada bagian ini akan diuraikan data tanggapan 30 orang pada bagian satuan pengawasan intern (SPI) dan komite audit yang menjadi responden tentang peran komite audit dalam pengawasan perusahaan. Skor jawaban responden akan diklasifikasikan berdasarkan skor aktual dan skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\%\,\text{skor aktual} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \times 100\%$$

Keterangan:

a. Skor aktual adalah skor jawaban yang diperoleh dari seluruh responden atas kuesioner yang telah diajukan
b. Skor ideal adalah skor maksimum atau skor tertingi yang mungkin diperoleh jika semua responden memilih jawaban dengan skor tertingi.

Analisis kualitatif diakukan mengacu kepada setiap indikator yang ada pada variabel peran komite audit. Selanjutnya untuk mendapatkan gambaran peran komite audit secara menyeluruh, akan dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden atas ketiga indikator dan hasilnya dirangkum pada tabel berikut.

Tabel 4.5

Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Pada Variabel Peran komite audit

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1	Kondisi keuangan perusahaan	107	150	71,3%	Baik
2	Hasil usaha perusahaan	103	150	68,7%	Baik
3	Rencana dan komitmen jangka panjang	97	150	64,7%	Cukup
	Laporan Keuangan	**307**	**450**	**68,2%**	**Baik**
4	Menilai kebijakan	103	150	68,7%	Baik
5	Memonitor proses pengendalian	105	150	70,0%	Baik
6	Memeriksa kasus-kasus penting	100	150	66,7%	Cukup
7	Memeriksa laporan	92	150	61,3%	Cukup
	Corporate Governance	**400**	**600**	**66,7%**	**Cukup**
8	Pemahaman tentang resiko	104	150	69,3%	Baik
9	Sistem pengendalian intern	104	150	69,3%	Baik
10	Pemantauan proses pengawasan	103	150	68,7%	Baik
	Pengawasan Perusahaan	**311**	**450**	**69,1%**	**Baik**
	Total	**1018**	**1500**	**67,9%**	**Cukup**

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden maka dapat disimpulkan bahwa peran komite audit pada PT Dirgantara Indonesia (Persero) sudah cukup. Komite audit pada PT Dirgantara Indonesia (Persero) sudah memperlihatkan peran yang baik dalam memonitor laporan keuangan perusahaan dan dalam memonitor tata kelola perusahaan sudah cukup baik. Selain itu komite audit pada PT Dirgantara Indonesia (Persero) juga sudah menunjukkan peran yang baik dalam pengawasan perusahaan.

Berikut diuraikan hasil tanggapan responden mengenai peran komite audit pada PT Dirgantara Indonesia (Persero) dalam pengawasan perusahaan berdasarkan indikator:

4.2.1.1 Laporan Keuangan

Komite audit berperan dalam memastikan manajemen perusahaan untuk memberikan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi keuangan perusahaan serta melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan bersama-sama dengan auditor. Guna mengetahui bagaimana gambaran peran komite audit pada PT Dirgantara Indonesia (Persero) dalam memonitor laporan keuangan, akan dilakukan kategorisasi terhadap jumlah skor tanggapan responden. Dari ketiga butir pernyataan yang diajukan kepada responden diperoleh tanggapannya sebagai berikut.

Tabel 4.6
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Laporan Keuangan

No	Butir Pernyataan		Skor Jawaban Responden					∑ skor
			5	4	3	2	1	
1	Kondisi keuangan perusahaan	F	0	17	13	0	0	107
		%	0.00	56,67	43.33	0.00	0,00	
2	Hasil usaha perusahaan	F	0	13	17	0	0	103
		%	0.00	43.33	56,67	0.00	0,00	
3	Rencana dan komitmen jangka panjang	F	0	11	15	4	0	97
		%	0,00	36,67	50.00	13.33	0,00	
	Akumulasi Jawaban Responden	F	0	41	45	4	0	307
		%	0.00	45,56	50.00	4.44	0,00	100

Sumber: Data primer (Diolah)

Pada umumnya responden sependapat bahwa karena komite audit telah memastikan dalam laporan keuangan terdapat informasi bagi manajemen mengenai kondisi keuangan perusahaan. Komite audit juga telah melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan bersama-sama dengan auditor dari hasil usaha perusahaan

karena laporan keuangan merupakan suatu gambaran dari hasil usaha perusahaan. Selain itu Komite audit juga berupaya memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh manjemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang rencana dan komitmen jangka panjang perusahaan.

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.6 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori skor tanggapan responden mengenai peran komite audit pada PT Dirgantara Indonesia (Persero) dalam memonitor laporan keuangan perusahaan. Pada indikator laporan keuangan dengan jumlah item pernyataan 3 butir dan jumlah responden 30 orang, maka persentase skor tanggapan responden adalah 68,2%.

Melalui persentase jumlah skor tanggapan responden dapat diketahui bahwa tingkat tanggapan responden terhadap ketiga butir pernyataan yang diajukan mengenai peran komite audit dalam memonitor laporan keuangan perusahaan termasuk dalam kategori baik. Data ini menunjukkan bahwa komite audit pada PT Dirgantara Indonesia (Persero) sudah memperlihatkan peran yang besar dalam memonitor laporan keuangan perusahaan.

4.2.1.2 *Corporate Governance*

Selain memonitor laporan keuangan perusahaan, komite audit juga berperan dalam memonitor tata kelola perusahaan. Guna mengetahui bagaimana peran komite audit pada PT Dirgantara Indonesia (Persero) dalam memonitor tata kelola perusahaan, akan dilakukan kategorisasi terhadap jumlah skor tanggapan responden.

Dari keempat butir pernyataan yang diajukan kepada responden diperoleh tanggapannya sebagai berikut.

Tabel 4.7
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai *Corporate Governance*

No	Butir Pernyataan		Skor Jawaban Responden					∑ skor
			5	4	3	2	1	
1	Menilai kebijakan	F	0	13	17	0	0	103
		%	0.00	43.33	56.67	0.00	0,00	
2	Memonitor proses pengendalian	F	0	15	15	0	0	105
		%	0,00	50,00	50.00	0.00	0,00	
3	Memeriksa kasus-kasus penting	F	0	10	20	0	0	100
		%	0,00	33.33	66.67	0.00	0,00	
4	Memeriksa laporan	F	0	8	16	6	0	92
		%	0.00	26.67	53.33	20,00	0,00	
	Akumulasi Jawaban Responden	F	22	51	30	17	0	400
		%	24,44	56,67	33,33	18,89	0,00	100

Sumber: Data primer (Diolah)

Hasil tanggapan responden menunjukkan bahwa Komite audit dalam memonitor kebijakan selalu patuh terhadap undang-undang dan peraturan, karena dalam memonitor kebijakan perusahaan tersebut komite audit tidak mendapat benturan dari pihak manapun. Komite audit juga memonitor proses pengendalian yang sedang terjadi ataupun yang ditunda dalam hal mana perusahaan menjadi salah satu pihak yang terkai di dalamnya dan bersamama-sama dengan auditor melakukan penelaahan dalam memeriksa kasus-kasus penting. Selain itu Komite Audit memeriksa laporan dari auditor internal mengenai hasil pengkajian atas penerapan *good corporate governance* di perusahaan dan temuan-temuan penting lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.7 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori skor tanggapan responden mengenai peran komite audit

pada PT Dirgantara Indonesia (Persero) dalam memonitor tata kelola perusahaan. Pada indikator *corporate governance* dengan jumlah item pernyataan 4 butir dan jumlah responden 30 orang, maka persentase skor tanggapan responden adalah 66,7%.

Melalui persentase jumlah skor tanggapan responden dapat diketahui bahwa tingkat tanggapan responden terhadap keempat butir pernyataan yang diajukan mengenai peran komite audit dalam memonitor tata kelola perusahaan termasuk dalam kategori cukup. Data ini menunjukkan bahwa komite pada PT Dirgantara Indonesia (Persero) sudah menunjukkan peran yang besar dalam memonitor tata kelola perusahaan.

4.2.1.3 Pengawasan Perusahaan

Peran komite audit dalam pengawasan perusahaan menyangkut pemahaman tentang hal yang berpotensi mengandung resiko, pengkajian terhadap sistem pengendalian intern serta pemantauan atas proses pengawasan yang dilakukan oleh *internal auditor* atau satuan pengawasan intern. Guna mengetahui bagaimana peran komite audit pada PT Dirgantara Indonesia (Persero) dalam pengawasan perusahaan, akan dilakukan kategorisasi terhadap jumlah skor tanggapan responden. Dari ketiga butir pernyataan yang diajukan kepada responden diperoleh tanggapannya sebagai berikut.

Tabel 4.8

Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Pengawasan Perusahaan

No	Butir Pernyataan		Skor Jawaban Responden					∑ skor
			5	4	3	2	1	
1	Pemahaman tentang resiko	F	0	14	16	0	0	104
		%	0,0	46,7	53,3	0,0	0,0	
2	Sistem pengendalian intern	F	0	16	12	2	0	104
		%	0,0	53,3	40,0	6,7	0,0	
3	Pemantauan proses pengawasan	F	1	15	10	4	0	103
		%	3,3	50,0	33,3	13,3	0,0	
	Akumulasi Jawaban Responden	F	1	45	38	6	0	311
		%	1,1	50,0	42,2	6,7	0,0	100

Sumber: Data primer (Diolah)

Melalui tanggapan responden pada tabel 4.8 dapat diketahui bahwa komite audit sudah menunjukkan tanggungjawabnya terhadap pengawasan perusahaan menyangkut pemahaman tentang hal yang berpotensi mengandung resiko. Komite audit juga melakukan pengkajian terhadap sistem pengendalian intern serta melakukan pemantauan atas proses pengawasan yang dilakukan oleh *internal auditor* atau satuan pengawasan intern.

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.8 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori skor tanggapan responden mengenai peran komite audit pada PT Dirgantara Indonesia (Persero) dalam pengawasan perusahaan. Pada indikator dalam pengawasan perusahaan dengan jumlah item pernyataan 3 butir dan jumlah responden 30 orang, maka persentase skor tanggapan responden adalah 69,1%.

Melalui persentase jumlah skor tanggapan responden dapat diketahui bahwa tingkat tanggapan responden terhadap ketiga butir pernyataan yang diajukan

mengenai peran komite audit dalam pengawasan perusahaan termasuk kategori baik. Data ini menunjukkan bahwa komite audit pada PT Dirgantara Indonesia (Persero) sudah menunjukkan peran yang besar dalam pengawasan perusahaan.

4.2.2 Analisis Pelaksanaan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Pada PT Dirgantara Indonesia (Persero)

Pada bagian ini akan diuraikan data tanggapan 30 orang pada bagian Satuan pengawasan intern (SPI) dan komite audit yang menjadi responden tentang pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Sama halnya pada peran komite audit, skor jawaban responden akan diklasifikasikan berdasarkan skor aktual dan skor ideal. Analisis dilakukan mengacu kepada setiap indikator yang ada pada variabel pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Selanjutnya untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* secara menyeluruh, akan dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden atas kelima indikator dan hasilnya dirangkum pada tabel berikut.

Tabel 4.9
Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Pada Variabel Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1	Menyediakan informasi	102	150	68,0%	Cukup
2	Kebijakan perusahaan harus tertulis	102	150	68,0%	Cukup
3	Prinsip keterbukaan	103	150	68,7%	Baik
	Transparansi	**307**	**450**	**68,2%**	**Baik**
4	Mempunyai kompetensi	101	150	67,3%	Cukup

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
5	Sisitem pengendalian internal	100	150	66,7%	Cukup
6	Memiliki ukuran kinerja	103	150	68,7%	Baik
	Akuntabilitas	**304**	**450**	**67,6%**	Cukup
7	Kepatuhan	101	150	67,3%	Cukup
8	Tanggungjawab sosial	107	150	71,3%	Baik
9	Melindungi pemegang saham dan *stakeholders*	91	150	60,7%	Cukup
	Responsibilitas	**299**	**450**	**66,4%**	Cukup
10	Profesional	104	150	69,3%	Baik
11	Benturan kepentingan dan pengaruh	100	150	66,7%	Cukup
12	Melaksanakan fungsi dan tugas	104	150	69,3%	Baik
	Independensi	**308**	**450**	**68,4%**	Baik
13	Memberikan kesempatan	99	150	66,0%	Cukup
14	Perlakuan setara dan wajar	105	150	70,0%	Baik
15	Hak-hak karyawan	102	150	68,0%	Cukup
	Kewajaran	**306**	**450**	**68,0%**	Cukup
	Total	**1524**	**2250**	**67,73%**	Cukup

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada PT Dirgantara Indonesia (Persero) sudah cukup. Artinya PT Dirgantara Indonesia (Persero) sudah dikelola dengan cukup. Hal ini dikukung oleh transparansi dan idependensi dalam tata kelola perusahaan yang termasuk dalam kriteria baik. Berikut diuraikan hasil tanggapan responden mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip *Good*

Corporate Governance pada PT Dirgantara Indonesia (Persero) berdasarkan indikator:

4.2.2.1 Transparansi

Transparansi bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Guna mengetahui bagaimana transparansi pada PT Dirgantara Indonesia (Persero), akan dilakukan kategorisasi terhadap jumlah skor tanggapan responden. Dari ketiga butir pernyataan mengenai transparansi yang diajukan kepada responden diperoleh tanggapannya sebagai berikut.

Tabel 4.10
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Transparansi

No	Butir Pernyataan		Skor Jawaban Responden					∑ skor
			5	4	3	2	1	
1	Menyediakan informasi	F	0	15	12	3	0	102
		%	0,0	50,0	40,0	10,0	0,0	
2	Kebijakan perusahaan harus tertulis	F	1	11	17	1	0	102
		%	3,3	36,7	56,7	3,3	0,0	
3	Prinsip keterbukaan	F	1	12	16	1	0	103
		%	3,3	40,0	53,3	3,3	0,0	
	Akumulasi Jawaban Responden	F	2	38	45	5	0	307
		%	2,2	42,2	50,0	5,6	0,0	100

Sumber: Data primer (Diolah)

Pada umumnya responden sependapat perusahaan sudah menyediakan informasi secara tepat waktu agar mudah diakses, karena informasi tersebut berguna bagi pemengku kepentingan tersebut. Kebijakan perusahaan secara tertulis dan secara profesional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan. Kemudian prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan mampu mengurangi kewajiban untuk

memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan perundang-undangan dan hak pribadi.

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.10 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori skor tanggapan responden mengenai transparansi pada PT Dirgantara Indonesia (Persero). Pada indikator transparansi dengan jumlah item pernyataan 3 butir dan jumlah responden 30 orang, maka persentase skor tanggapan responden adalah 68,2%.

Melalui persentase jumlah skor tanggapan responden dapat diketahui bahwa tingkat tanggapan responden terhadap ketiga butir pernyataan yang diajukan mengenai transparansi termasuk dalam kategori baik. Data ini menunjukkan bahwa tata kelola di PT Dirgantara Indonesia (Persero) sudah transparan.

4.2.2.2 Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Guna mengetahui bagaimana akuntabilitas pada PT Dirgantara Indonesia (Persero), akan dilakukan kategorisasi terhadap jumlah skor tanggapan responden. Dari ketiga butir pernyataan mengenai akuntabilitas yang diajukan kepada responden diperoleh tanggapannya sebagai berikut.

Tabel 4.11
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Akuntabilitas

No	Butir Pernyataan		Skor Jawaban Responden					∑ skor
			5	4	3	2	1	
1	Mempunyai kompetensi	F	0	11	19	0	0	101
		%	0,0	36,7	63,3	0,0	0,0	
2	Sisitem pengendalian internal	F	0	11	18	1	0	100
		%	0,0	36,7	60,0	3,3	0,0	
3	Memiliki ukuran kinerja	F	0	14	15	1	0	103
		%	0,0	46,7	50,0	3,3	0,0	
	Akumulasi Jawaban Responden	F	0	36	52	2	0	304
		%	0,0	40,0	57,8	2,2	0,0	100

Sumber: Data primer (Diolah)

Melalui tanggapan responden yang terdapat pada tabel 4.11 dapat dilihat bahwa perusahaan meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kompetensi sesuai dengan tugas, tanggungjawab, dan peranannya dalam pelaksanaan GCG. Perusahaan sudah memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan. Perusahaaan juga memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan nilai-nilai perusahaan, sasaran utama dan strategi perusahaan.

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.11 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori skor tanggapan responden mengenai akuntabilitas pada PT Dirgantara Indonesia (Persero). Pada indikator akuntabilitas dengan jumlah item pernyataan 3 butir dan jumlah responden 30 orang, maka persentase skor tanggapan responden adalah 67,6%.

Melalui persentase jumlah skor tanggapan responden dapat diketahui bahwa tingkat tanggapan responden terhadap ketiga butir pernyataan yang diajukan mengenai akuntabilitas termasuk dalam kategori cukup. Data ini menunjukkan bahwa

akuntabilitas dalam tata kelola perusahaan di PT Dirgantara Indonesia (Persero) sudah cukup.

4.2.2.3 Responsibilitas

Pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Guna mengetahui bagaimana responsibilitas pada PT Dirgantara Indonesia (Persero), akan dilakukan kategorisasi terhadap jumlah skor tanggapan responden. Dari ketiga butir pernyataan mengenai responsibilitas yang diajukan kepada responden diperoleh tanggapannya sebagai berikut.

Tabel 4.12
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Responsibilitas

No	Butir Pernyataan		Skor Jawaban Responden					∑ skor
			5	4	3	2	1	
1	Kepatuhan	F	0	12	17	1	0	101
		%	0,0	40,0	56,7	3,3	0,0	
2	Tanggungjawab sosial	F	0	18	11	1	0	107
		%	0,0	60,0	36,7	3,3	0,0	
3	Melindungi pemegang saham dan *stakeholders*	F	0	8	15	7	0	91
		%	0,0	26,7	50,0	23,3	0,0	
	Akumulasi Jawaban Responden	F	0	38	43	9	0	299
		%	0,0	42,2	47,8	10,0	0,0	100

Sumber: Data primer (Diolah)

Melalui tanggapan responden yang terdapat pada tabel 4.12 dapat dilihat bahwa masih cukup banyak organ dalam perusahaan yang kurang patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Perusahaan melakukan tanggungjawab sosial terhadap masyarakat karena dalam tanggungjawab sosial tersebut perusahaan peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan sekitar perusahaan. Perusahaaan juga

memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan nilai-nilai perusahaan, sasaran utama dan strategi perusahaan. Perusahaan juga melindungi pemegang saham dan s*takeholders* karena kepentingan pemegang saham dan *stakeholders* harus dilindungi oleh perusahaan.

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.12 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori skor tanggapan responden mengenai responsibilitas pada PT Dirgantara Indonesia (Persero). Pada indikator responsibilitas dengan jumlah item pernyataan 3 butir dan jumlah responden 30 orang, maka persentase skor tanggapan responden adalah 66,4%.

Melalui persentase jumlah skor tanggapan responden dapat diketahui bahwa tingkat tanggapan responden terhadap ketiga butir pernyataan yang diajukan mengenai responsibilitas termasuk dalam kategori cukup. Data ini menunjukkan bahwa responsibilitas dalam tata kelola perusahaan di PT Dirgantara Indonesia (Persero) sudah cukup.

4.2.2.4 Independensi

Independensi atau kemandirian adalah suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan perngaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Guna mengetahui bagaimana independensi pada PT Dirgantara Indonesia (Persero), akan dilakukan kategorisasi terhadap jumlah skor tanggapan responden. Dari ketiga butir pernyataan mengenai

independensi yang diajukan kepada responden diperoleh tanggapannya sebagai berikut.

Tabel 4.13
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Independensi

No	**Butir Pernyataan**		**Skor Jawaban Responden**					**∑ skor**
			5	**4**	**3**	**2**	**1**	
1	Profesional	F	0	15	14	1	0	104
		%	0,0	50,0	46,7	3,3	0,0	
2	Benturan kepentingan dan pengaruh	F	0	11	18	1	0	100
		%	0,0	36,7	60,0	3,3	0,0	
3	Melaksanakan fungsi dan tugas	F	1	14	13	2	0	104
		%	3,3	46,7	43,3	6,7	0,0	
	Akumulasi Jawaban Responden	F	1	40	45	4	0	308
		%	1,1	44,4	50,0	4,4	0,0	100

Sumber: Data primer (Diolah)

Melalui tanggapan responden yang terdapat pada tabel 4.13 dapat dilihat bahwa perusahaan belum dikelola secara profesional. Dalam pengelolaan perusahaan cukup sering terjadi benturan kepentingan dan pengaruh dari pihak tertentu. Hal ini terjadi karena masing-masing organ perusahaan belum melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.13 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori skor tanggapan responden mengenai independensi pada PT Dirgantara Indonesia (Persero). Pada indikator independensi dengan jumlah item pernyataan 3 butir dan jumlah responden 30 orang, maka persentase skor tanggapan responden adalah 68,4%.

Melalui persentase jumlah skor tanggapan responden dapat diketahui bahwa tingkat tanggapan responden terhadap ketiga butir pernyataan yang diajukan mengenai independensi termasuk dalam kategori baik. Data ini menunjukkan bahwa

independensi dalam tata kelola perusahaan di PT Dirgantara Indonesia (Persero) sudah baik.

4.2.2.5 Kewajaran

Secara sederhana kewajaran (fairness) bisa didefenisikan sebagai perlakukan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Guna mengetahui bagaimana kewajaran pada PT Dirgantara Indonesia (Persero), akan dilakukan kategorisasi terhadap jumlah skor tanggapan responden. Dari ketiga butir pernyataan mengenai kewajaran yang diajukan kepada responden diperoleh tanggapannya sebagai berikut.

Tabel 4.14
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Kewajaran

No	Butir Pernyataan		Skor Jawaban Responden					∑ skor
			5	4	3	2	1	
1	Memberikan kesempatan	F	0	11	17	2	0	99
		%	0,0	36,7	56,7	6,7	0,0	
2	Perlakuan setara dan wajar	F	0	16	13	1	0	105
		%	0,0	53,3	43,3	3,3	0,0	
3	Hak-hak karyawan	F	0	13	16	1	0	102
		%	0,0	43,3	53,3	3,3	0,0	
	Akumulasi Jawaban Responden	F	0	40	46	4	0	306
		%	0,0	44,4	51,1	4,4	0,0	100

Sumber: Data primer (Diolah)

Melalui tanggapan responden yang terdapat pada tabel 4.14 dapat dilihat bahwa perusahaan sudah memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan memberikan pendapat bagi kepentingan perusahaan.

Perusahaan juga memberikan perlakukan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan. Tetapi sayangnya hak-hak karyawan belum dipenuhi oleh perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.14 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori skor tanggapan responden mengenai kewajaran pada PT Dirgantara Indonesia (Persero). Pada indikator kewajaran dengan jumlah item pernyataan 3 butir dan jumlah responden 30 orang, maka persentase skor tanggapan responden adalah 68,0%.

Melalui persentase jumlah skor tanggapan responden dapat diketahui bahwa tingkat tanggapan responden terhadap ketiga butir pernyataan yang diajukan mengenai kewajaran termasuk dalam kategori cukup. Data ini menunjukkan bahwa kewajaran dalam tata kelola perusahaan di PT Dirgantara Indonesia (Persero) sudah cukup.

4.2.3 Peran Komite Audit Dalam Pelaksanaan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

Pada bagian ini hipotesis konseptual yang sebelumnya diajukan akan diuji dan dibuktikan melalui uji statistik. Hipotesis konseptual yang diajukan seperti yang telah dituangkan di dalam bab II adalah adanya peranan dari komite audit dalam pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada PT Dirgantara

Indonesia (Persero). Analisis statistik yang digunakan adalah analisis korelasi *product moment*.

Data variabel X (peran komite audit) dan variabel Y (pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*) yang digunakan untuk perhitungan korelasi dan regressi disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.15
Rekap Data Variabel Peran komite audit (X) dan Variabel Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (Y)

No	X	Y	X^2	Y^2	XY
1	20,771	43,687	431,434	1908,554	907,423
2	24,099	53,811	580,762	2895,624	1296,791
3	24,138	46,661	582,643	2177,249	1126,303
4	22,676	45,197	514,201	2042,769	1024,887
5	24,080	54,169	579,846	2934,281	1304,390
6	24,164	53,690	583,899	2882,616	1297,365
7	21,120	37,775	446,054	1426,951	797,808
8	16,663	39,048	277,656	1524,746	650,657
9	19,279	40,832	371,680	1667,252	787,200
10	24,007	37,821	576,336	1430,428	907,969
11	22,094	50,801	488,145	2580,742	1122,397
12	22,348	47,690	499,433	2274,336	1065,776
13	26,895	52,548	723,341	2761,292	1413,278
14	23,702	48,100	561,785	2313,610	1140,066
15	12,561	40,757	157,779	1661,133	511,949
16	16,424	49,265	269,748	2427,040	809,128
17	12,261	28,676	150,332	822,313	351,596
18	14,938	36,028	223,144	1298,017	538,186
19	25,513	46,524	650,913	2164,483	1186,967
20	19,519	39,736	380,991	1578,950	775,607
21	11,602	31,909	134,606	1018,184	370,208
22	14,163	37,842	200,591	1432,017	535,956

No	X	Y	X^2	Y^2	XY
23	28,253	42,092	798,232	1771,736	1189,225
24	19,206	38,035	368,870	1446,661	730,500
25	13,870	33,724	192,377	1137,308	467,752
26	28,505	56,742	812,535	3219,655	1617,431
27	27,182	51,181	738,861	2619,495	1391,202
28	22,348	53,660	499,433	2879,396	1199,194
29	18,870	50,988	356,077	2599,776	962,144
30	27,346	55,310	747,804	3059,196	1512,507
∑	**628,597**	**1344,299**	**13899,508**	**61955,809**	**28991,863**

4.2.3.1 Analisis Korelasi

Kedekatan hubungan antara variabel peran komite audit dengan pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* diukur melalui koefisien korelasi. Korelasi antara peran komite audit dengan pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dihitung menggunakan korelasi *product moment* dengan rumus sebagai berikut.

$$r_{XY} = \frac{n\sum XY - \sum X \sum Y}{\sqrt{\left[\left(n\sum X^2 - \left(\sum X\right)^2\right) \times \left(n\sum Y^2 - \left(\sum Y\right)^2\right)\right]}}$$

$$r_{XY} = \frac{30 \times 28991{,}863 - \left(628{,}597 \times 1344{,}299\right)}{\sqrt{\left[\left(30 \times \left(13899{,}508\right) - \left(628{,}597\right)^2\right) \times \left(30 \times \left(61955{,}809\right) - \left(1344{,}299\right)^2\right)\right]}}$$

$$r_{XY} = \frac{869755{,}900 - 845022{,}319}{\sqrt{\left[\left(416985{,}251 - 395134{,}188\right) \times \left(1858674{,}266 - 1807139{,}801\right)\right]}}$$

$$r_{XY} = \frac{24733{,}581}{\sqrt{21851{,}063 \times 51534{,}465}}$$

$$r_{XY} = \frac{24733,581}{33557,157}$$
$$r_{XY} = 0,737$$

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan software SPSS 12 *for windows*, diperoleh hasil estimasi besarnya hubungan antara peran komite audit dengan pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.16
Korelasi Antara Variabel X dengan Variabel Y

Correlations

		Pelaksanaan GCG	Komite Audit
Pelaksanaan GCG	Pearson Correlation	1	.737**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	30	30
Komite Audit	Pearson Correlation	.737**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	30	30

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat dilihat bahwa besar hubungan antar variabel peran komite audit dengan pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang dihitung dengan koefisien korelasi adalah 0,737. Hal ini menunjukkan terdapat hubungan yang kuat dan positif antara peran komite audit dengan pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada PT Dirgantara Indonesia (Persero). Arah hubungan positif menunjukkan bahwa semakin besar peran komite audit akan membuat pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

semakin baik. Demikian pula sebaliknya, semakin rendah peran komite audit akan membuat pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* makin tidak baik.

Selain itu, tingkat signifikansi koefisien korelasi (diukur dari sig.) menghasilkan angka 0.000 atau lebih kecil dari 0,05. Artinya koefisien korelasi antara peran komite audit dengan pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada PT Dirgantara Indonesia (Persero) signifikan pada level 5%.

4.2.3.2 Analisis Regressi

Sebelum diuji peranan komite audit (X) terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (Y) pada pada PT Dirgantara Indonesia (Persero), terlebih dahulu dihitung koefisien regressi. Menggunakan data-data yang tercantum pada tabel 4.15, dapat diestimasi persamaan regressi menggunakan rumus sebagai berikut:

Konstanta (a)

$$a = \frac{\sum X^2 \sum Y - \sum X \sum XY}{n\sum X^2 - \left(\sum X\right)^2}$$

$$a = \frac{(13899,508)\times(1344,299) - (628,597\times 1344,299)}{30\times(13899,508) - (628,597)^2}$$

$$a = \frac{18685095,196 - 18224198,310}{416985,251 - 395134,188}$$

$$a = \frac{460896,886}{21851,063}$$

$$a = 21,093$$

Koefisien regressi variabel X (b)

$$b = \frac{n\sum XY - \sum X \sum Y}{n\sum X^2 - \left(\sum X\right)^2}$$

$$b = \frac{30\times(28991{,}863) - \left(628{,}597\times 1344{,}299\right)}{30\times\left(13899{,}508\right) - \left(628{,}597\right)^2}$$

$$b = \frac{869755{,}900 - 845022{,}319}{416985{,}251 - 395134{,}188}$$

$$b = \frac{24733{,}581}{21851{,}063}$$

$$b = 1{,}132$$

Menggunakan software SPSS 12 *for windows*, diperoleh hasil regressi peranan komite audit terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.17
Hasil Analisis Regresi

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	21.093	4.222		4.996	.000
	Komite Audit	1.132	.196	.737	5.771	.000

a. Dependent Variable: Pelaksanaan GCG

Melalui hasil regressi yang terdapat pada tabel di atas maka dapat dibentuk sebuah persamaan regresi sebagai berikut:

Y = 21,093 + 1,132 X

Dimana : Y = Komite Audit
X = Prinsip-prinsip GCG

Nilai konstanta (a) sebesar 21,093 menunjukkan nilai rata-rata pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada pada PT Dirgantara Indonesia (Persero) apabila komite audit tidak berperan. Kemudian nilai koefisien regressi (b) sebesar 1,132 menunjukkan peningkatan pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada pada PT Dirgantara Indonesia (Persero) apabila peran komite audit ditingkatkan sebesar satu satuan.

Dari hasil perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa koefisien regresi memiliki tanda positif, artinya semakin besar peran komite audit diduga akan meningkatkan pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada pada PT Dirgantara Indonesia (Persero). Sebaliknya, semakin kecil peran komite audit diduga akan menurunkan pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada pada PT Dirgantara Indonesia (Persero).

4.2.3.3 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R-square) merupakan nilai yang digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel independen terhadap perubahan variabel dependen. Koefisien determinasi diperoleh dari hasil kuadrat koefisien korelasi, dari nilai koefisien yang diperoleh, yaitu sebesar 0,737, dihitung koefisien determinasi (KD) sebagai berikut.

$KD = (0{,}737)^2 \times 100\% = 54{,}3\%$

Menggunakan software SPSS 12 *for windows*, diperoleh hasil regressi peranan komite audit terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.18
Hasil Analisis Regresi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.737[a]	.543	.527	5.293540

a. Predictors: (Constant), Komite Audit

b. Dependent Variable: Pelaksanaan GCG

Koefisien determinasi sebesar 54,3% menunjukkan bahwa 45,7% perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada PT Dirgantara Indonesia (Persero) bisa dijelaskan oleh peran komite audit. Artinya peran komite audit mampu memberikan kontribusi atau peran dalam pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada PT Dirgantara Indonesia (Persero) sebesar 56,0 persen. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 45,7% dijelaskan variabel lain di luar variabel peran komite audit, seperti dewan komisaris, direksi, pejabat dan pegawai dan pihak-pihak ektern PT Dirgantara Indonesia (Persero).

4.2.3.4 Pengujian Hipotesis

Hipotesis yang akan diuji pada penelitian ini dituangkan kedalam bentuk hipotesis statistik sebagai berikut.

Ho: $\rho = 0$ Komite audit (X) tidak berperan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (Y) pada PT Dirgantara Indonesia (Persero)

Ha: $\rho \neq 0$ Komite audit (X) berperan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*(Y) pada PT Dirgantara Indonesia (Persero)

Penolakan dan penerimaan Ho didasarkan pada nilai statistik uji t dan nilai signifikansi. Apabila nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} (2,048) maka Ho ditolak dan Ha diterima atau jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima.

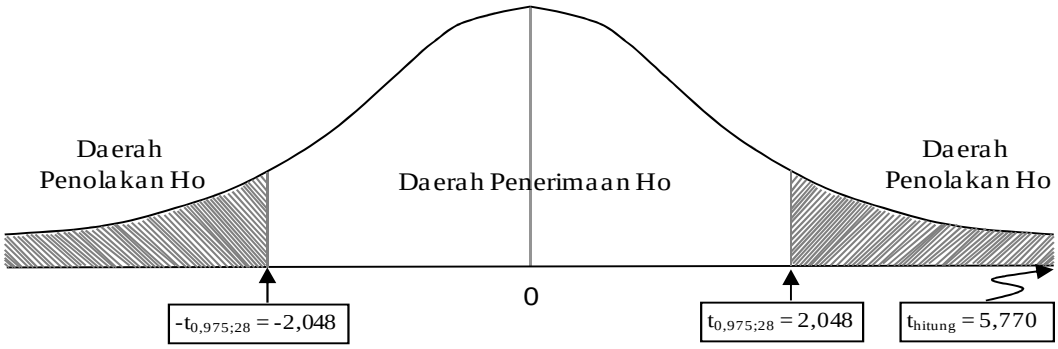
Selanjutnya, masih dengan menggunakan data perhitungan pada tabel di atas, akan dilakukan pengujian hipotesis untuk menguji signifikansi peran komite audit dalam pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Melalui koefisien korlasi yang diperoleh di atas akan diuji apakah peran komite audit benar-benar dapat meningkatkan pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Dengan kata lain, akan dilakukan pengujian apakah peran komite audit benar-benar merupakan salah satu faktor penunjang pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada PT Dirgantara Indonesia (Persero). Nilai statistik uji t dihitung menggunakan rumus sebagai berikut.

$$t_{hitung} = r_{xy} \times \sqrt{\frac{n-2}{1-\left(r_{xy}\right)^2}}$$

$$t_{hitung} = 0,737 \times \sqrt{\frac{30-2}{1-(0,737)^2}}$$

$$t_{hitung} = 5,770$$

Melalui hasil perhitungan di atas diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 5,770, sementara pada tabel t dengan tingkat kekeliruan 5% dan derajat bebas (30-2) = 28 diperoleh nilai t tabel sebesar 2,048. Karena t_{hitung} (5,770) lebih besar dari t_{tabel} (2,048), maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya terdapat peran komite audit dalam pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada PT Dirgantara Indonesia (Persero). Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa komite audit berperan signifikan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* Pada PT Dirgantara Indonesia (Persero).



Gambar 4.10
Grafik Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho

Dari hasil semua pernitungan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan komite audit mempunyai korelasi yang kuat dan positif (+) terhadap peningkatan pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance*, ditunjukkan

oleh angka hasil korelasi yang kuat yaitu sebesar 0,737. Ini berarti bahwa semakin besar peran komite audit akan meningkatkan pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* semakin tinggi.

Keberadaan komite audit juga mempunyai peran yang signifikan terhadap peningkatan pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance*, ditunjukkan oleh besarnya t_{hitung} lebih besar daripada t_{tabel} yaitu 5,770 > 2,048. Hal ini membuktikan hipotesis penelitian bahwa komite audit berperan dalam meningkatkan pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance*.

Setelah mendapatkan hasil dari perhitungan di atas baik perhitungan manual maupun menggunakan *SPSS 12.0 For Windows*, hasilnya adalah keberadaan komite audit dan *good corporate governance* sudah cukup, serta adanya peran yang kuat dan signifikan antara keberadaan komite audit dalam meningkatkan pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance*. Hal tersebut membuktikan bahwa hasil penelitian ini mendukung teori yang dikemukakan oleh Moh. Wahyudin Zarkasyi, Ak (2008:22) bahwa :

> "Peran komite audit erat kaitannya dengan GCG dan dapat dijadikan tolak ukur sukses bagi suatu perusahaan. Komite audit merupakan pilar penting dalam penerapan GCG, karena komite audit juga berperan dalam evaluasi laporan keuangan".

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keberadaan komite audit pada PT. Dirgantara Indonesia (Persero), telah berjalan dengan cukup sehingga pelaksanaan *good corporate governance* juga cukup.